



POTENSI PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DIY

**Tinjauan Kritis Dalam Menopang Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkesinambungan dan Inklusif**



Disajikan pada Musrenbangda
Yogyakarta, 29 Maret 2017

.....| Budi Hanoto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY

© **BI DIY 2017**



Pendahuluan

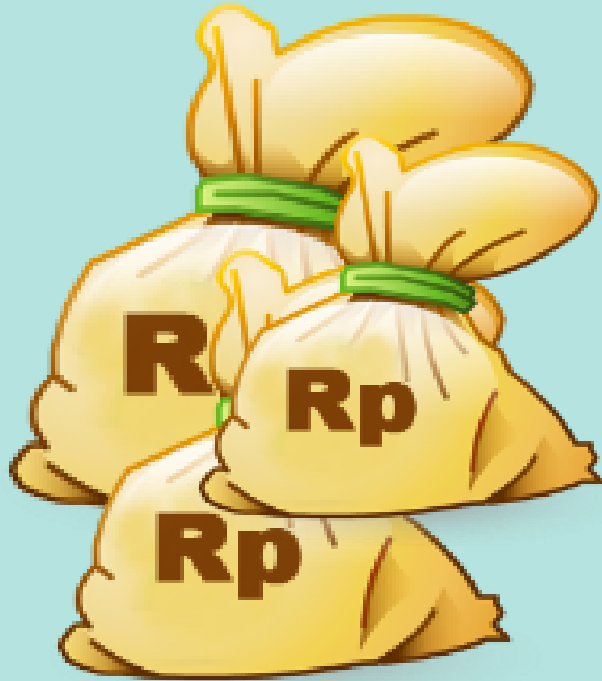
**Analisis Perkembangan APBD
DIY dan Tantangan**

**Arah Kebijakan
Pembangunan DIY (RPJMN)**

**Potensi Sumber Pembiayaan
Pembangunan**

**Peran BI dalam Memperkuat
Sumber Pembiayaan Pembangunan**

Penutup

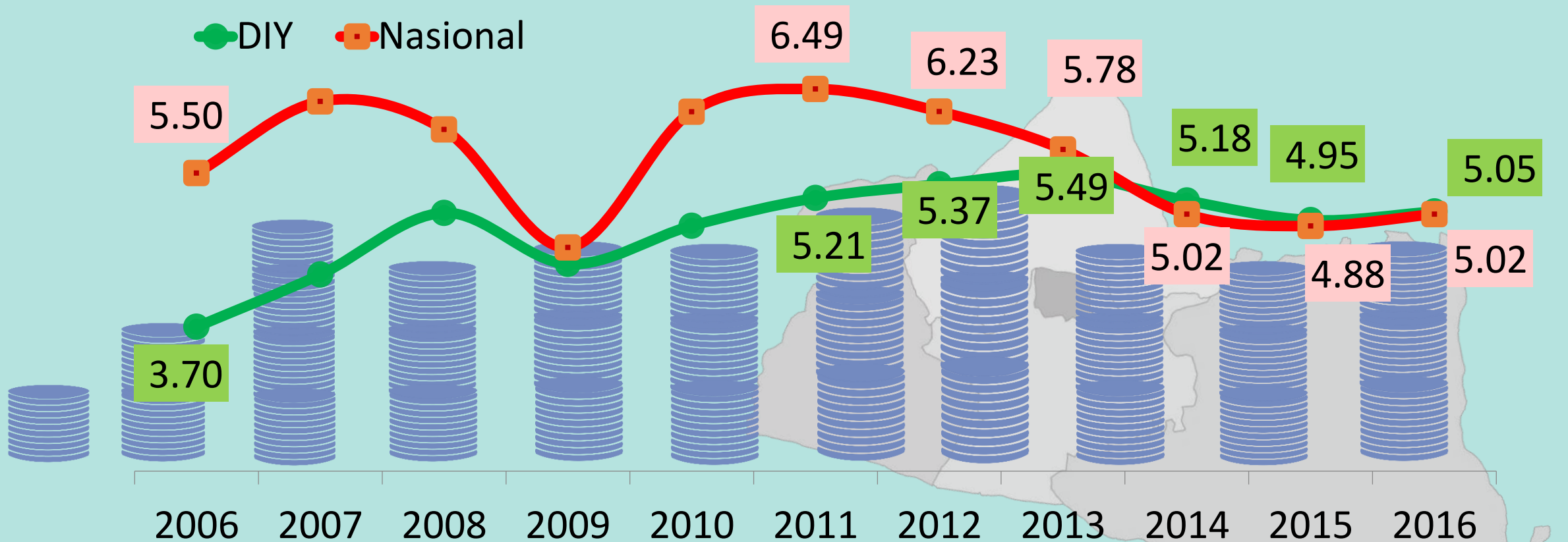


Pendahuluan

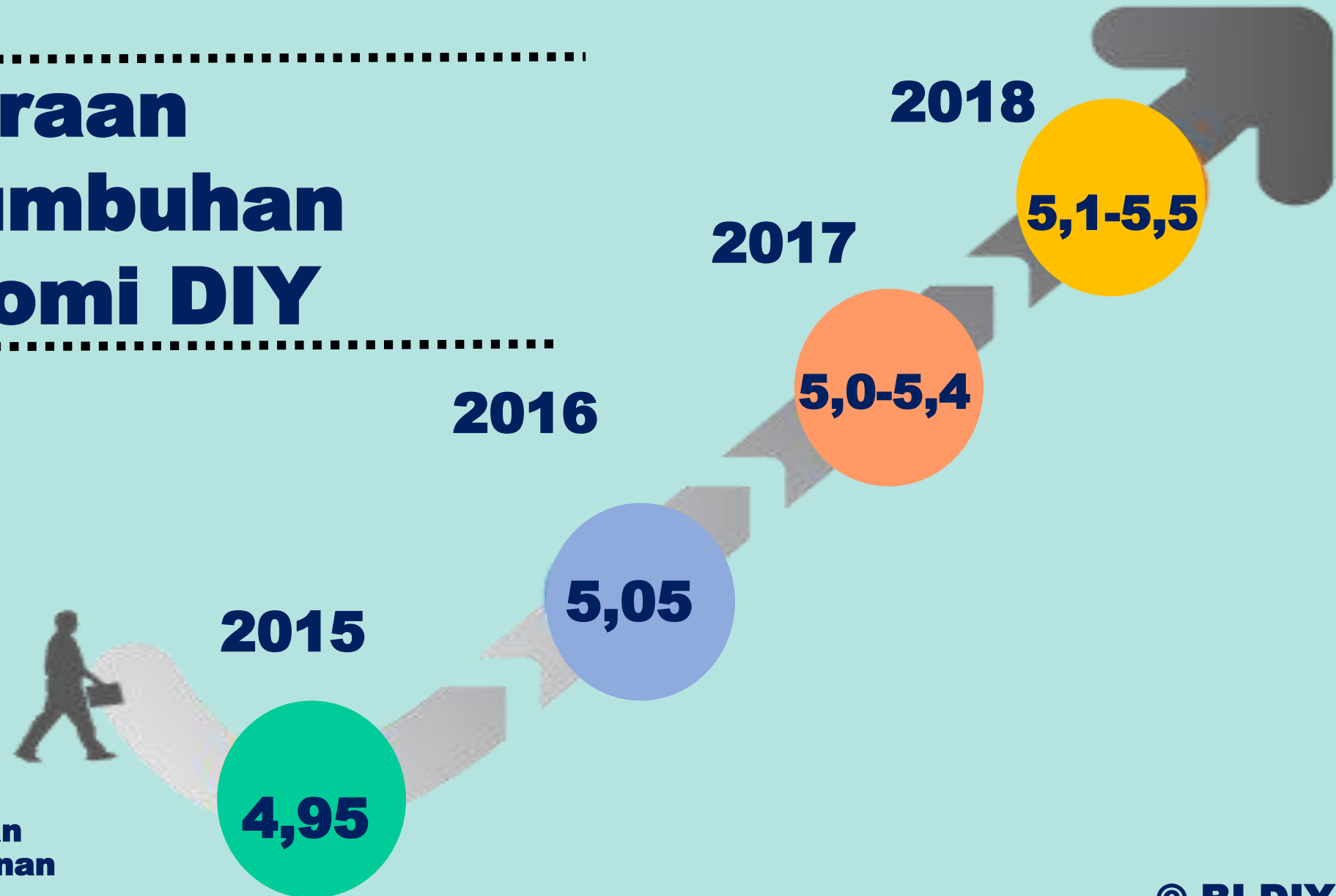


**Perkembangan Perekonomian DIY dan Outlook
Ekonomi Menyongsong New Yogyakarta
International Airport**

PERTUMBUHAN EKONOMI



Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi DIY



Pertumbuhan Ekonomi Global

Perekonomian global tetap tumbuh terutama didukung oleh perbaikan ekonomi AS dan negara-negara *emerging* serta harga komoditas yang meningkat.

- Ekonomi AS terus mengalami perbaikan.
- Pertumbuhan negara-negara *emerging*, di antaranya India, juga meningkat.
- Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan melambat.

	Realisasi	WEO IMF					Consensus Forecast						Bank Indonesia		
		Oktober 2016		Januari 2017			Januari 2017			Februari 2017			Februari 2017		
	2015	2016	2017	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Dunia	3,1	3,1	3,4	3,1	3,4	3,6	3,2	3,6	3,6	3,2	3,7	3,8	3,1	3,4	3,6
Negara Maju	1,9	1,6	1,8	1,6	1,9	2,0	1,6	1,8	1,8	1,7	2,0	1,9	1,6	1,9	1,9
Amerika Serikat	2,5	1,6	2,2	1,6	2,3	2,5	1,6	2,3	2,3	1,6	2,3	2,4	1,6	2,3	2,4
Kawasan Eropa	1,5	1,7	1,5	1,7	1,6	1,6	1,6	1,4	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5
Jepang	0,6	0,5	0,6	0,9	0,8	0,5	0,7	1,0	1,0	1,2	1,0	1,0	0,8	0,8	0,5
Negara Berkembang	4,0	4,2	4,6	4,1	4,5	4,8	4,6	5,2	5,1	4,6	5,2	5,1	4,1	4,5	4,7
Negara Berkembang Asia	6,6	6,5	6,3	6,3	6,4	6,3									
Tiongkok	6,9	6,6	6,2	6,7	6,5	6,0	6,7	6,4	6,1	6,7	6,1	6,1	6,7	6,5	6,5
India	7,3	7,6	7,6	6,6	7,2	7,7	7,0	7,5	7,2	6,8	7,4	7,4	7,4	7,4	7,5
Volume Perdagangan Dunia (barang dan jasa)	2,6												1,0	1,2	1,3
Minyak (Minas & ICP, Dolar AS per barel)	50,9	43,0	50,9	43,0	51,2	53,1									

Sumber: WEO, Consensus Forecast, Bank Indonesia (diolah)



POTENSI

Pertumbuhan global meningkat dengan kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi negara maju serta meningkatnya perekonomian di negara berkembang dan emerging market

RISIKO

1. Risiko inflasi global naik seiring harga komoditas energi dan non-energi yang meningkat
2. US Policy Mix: Expansionary FP & Tight MP, Relaxation of Financial Regulation, and Trade Protectionism
3. Risiko geopolitik Eropa naik, ditandai peningkatan gelombang populism



**Potensi
dan
Risiko
Global**

2017: 3,4%

2018: 3,6%

POTENSI

Proyek infrastruktur dan reformasi struktural

Kenaikan harga komoditas

RISIKO

- Proteksionisme perdagangan global (US Policy mix)
- Reformasi struktural tidak sesuai harapan
- Risiko shortfall pajak (penerimaan pajak tidak sesuai target)



**Potensi
dan
Risiko
Nasional**

**2017:
5,0-5,4%**

Risiko Global:

Harga Komoditas
Trade Volume
Harga Minyak

APBN terganggu

-Pajak
-Ekspor Minyak
-Ekspor Komoditi

Transfer ke Daerah Tidak Optimal

Kondisi Struktural Perekonomian Daerah yang berbeda-beda

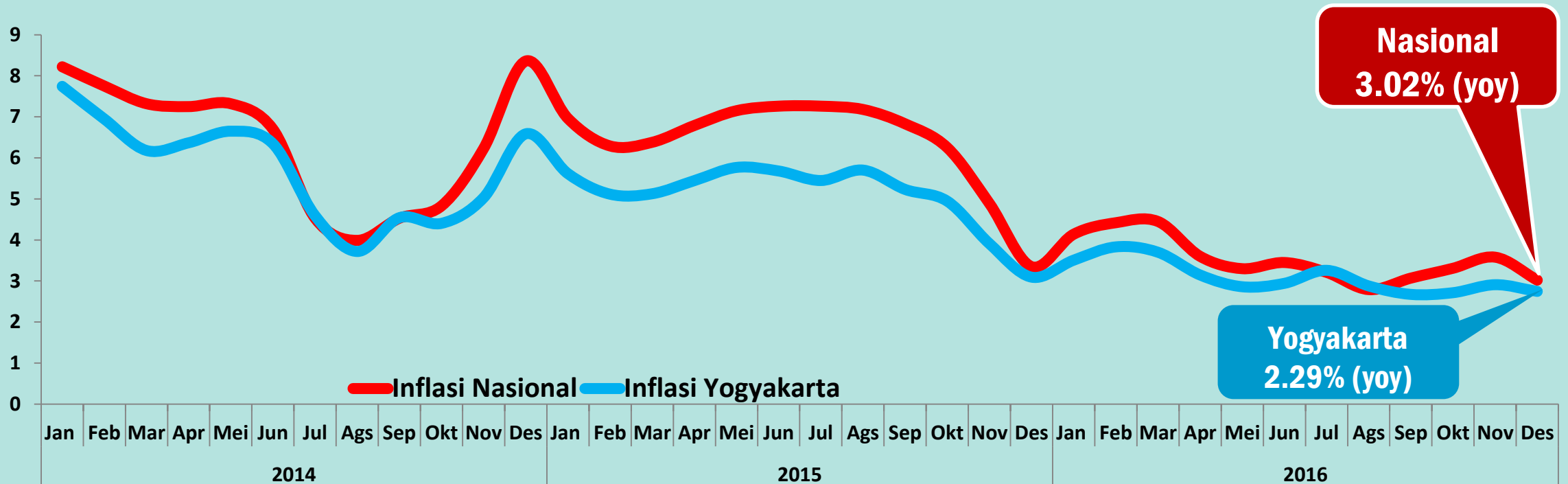
1. Disparitas Harga
2. Ketimpangan Sosial
3. Kemampuan PAD
4. Ketahanan Pangan
5. Konektivitas
6. Infrastruktur



**Pembiayaan
Pembangunan
DIY**

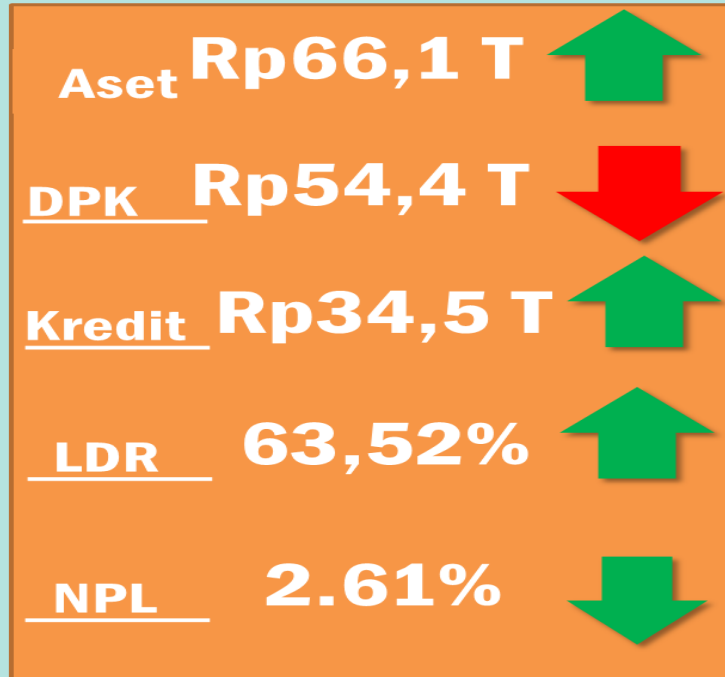
PERKEMBANGAN INFLASI

Pada tahun 2016 inflasi DIY sebesar 2.29% (yoy), pada 2017 dan 2018 Inflasi DIY diperkirakan tetap terjaga dan berada dalam rentang target inflasi sebesar **$4 \pm 1\%$ (2017)** dan **$3,5 \pm 1\%$ (2018)**

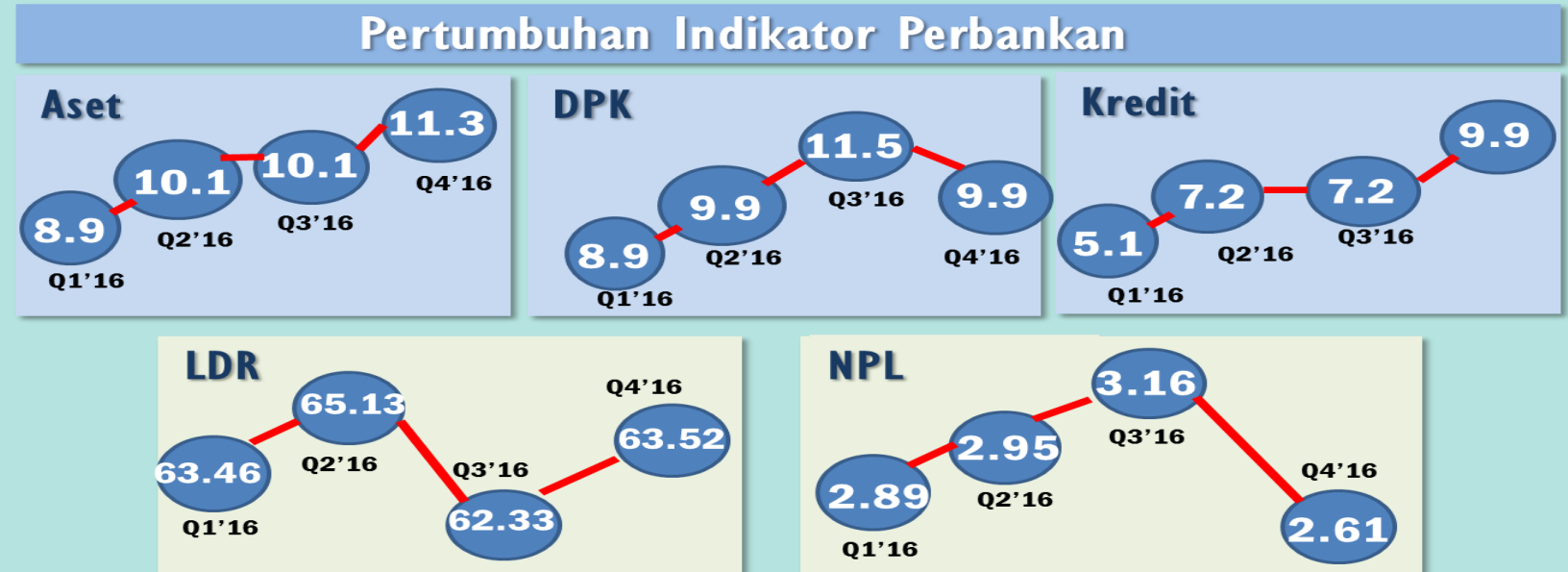


PERBANKAN DAN SSK

Membaiknya Kinerja Perbankan DIY pada 2016 diperkirakan akan terus berlanjut pada 2017, dengan outlook pertumbuhan kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK), masing2 mencapai 11% dan 12%



*Data Bank Umum dan BPR



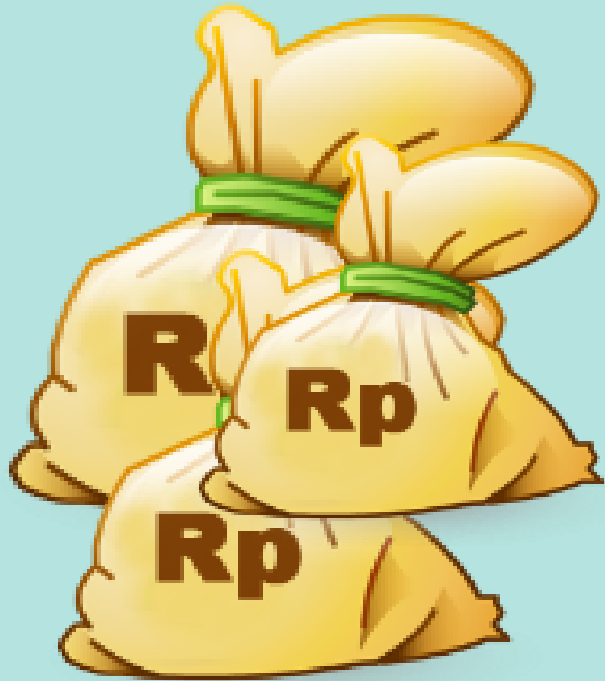
Keterangan : Membaik Memburuk

Sumber : Bank Indonesia, diolah

Kredit
2017
9 – 11%

DPK
2017
10 – 12%





Analisis Perkembangan APBD DIY dan Tantangannya



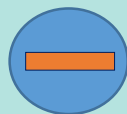
Konsep Anggaran Pemerintah

Pendapatan

- PAD
- Dana Perimbangan
- Lain2 Pendapatan yg Sah

Belanja

- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung



Pembiayaan Anggaran

SILPA

Pencairan Dana Cadangan

Penjualan Kekayaan Daerah

Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan Piutang

Penerimaan Kembali Investasi

Penerimaan Biaya Penyusutan



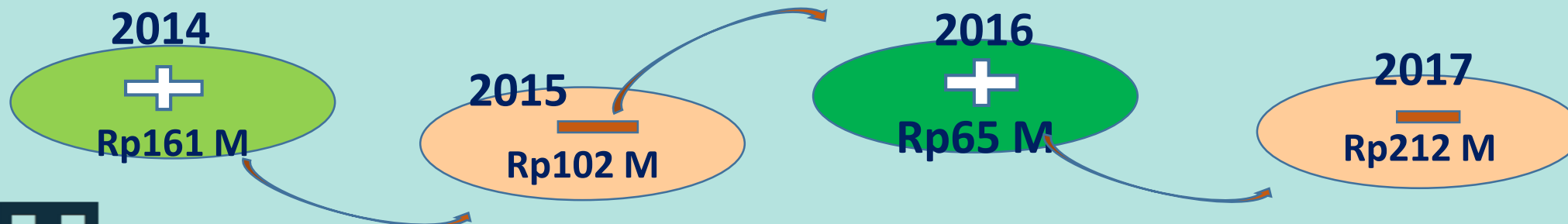
Postur Anggaran Pemerintah DIY

Postur APBD DIY menunjukkan kinerja yang fluktuatif, pada 2014 dan 2016 mengalami surplus, serta pada 2015 dan 2017*) mengalami defisit.

(Juta Rp)											
No	Pos Anggaran	2014			2015			2016			2017
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran
I	PENDAPATAN										
1	Pendapatan Asli Daerah	1,342,290	1,462,723	108.97	1,518,860	1,581,612	104.13	1,643,359	1,671,851	101.73	1,657,148
2	Dana Perimbangan	1,046,227	1,013,811	96.90	1,056,609	1,012,115	95.79	1,732,575	1,697,109	97.95	2,461,741
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah	767,243	661,359	86.20	782,293	779,258	99.61	529,732	528,335	99.74	869,490
	Jumlah Pendapatan	3,155,761	3,137,893	99.43	3,357,762	3,372,985	100.45	3,905,666	3,897,295	99.79	4,988,379
II	BELANJA										
1	Belanja Tidak Langsung	1,663,951	1,560,226	93.77	1,875,147	1,802,892	96.15	2,077,793	1,985,001	95.53	2,779,013
2	Belanja Langsung	1,802,795	1,416,476	78.57	1,930,945	1,672,402	86.61	1,962,056	1,846,400	94.11	2,421,373
	Jumlah Belanja	3,466,745	2,976,703	85.86	3,806,093	3,475,294	91.31	4,039,849	3,831,401	94.84	5,200,386
	Surplus/Defisit	(310,985)	161,191	(51.83)	(448,331)	(102,309)	22.82	(134,182)	65,894	(49.11)	(212,007)
III	PEMBIAYAAN										
1	Penerimaan Pembiayaan	382,020	389,499	101.96	498,331	510,167	102.38	364,682	370,880	101.70	216,007
2	Pengeluaran Pembiayaan	71,036	50,000	70.39	50,000	50,000	100.00	230,500	230,000	99.78	4,000
	PEMBIAYAAN NETTO	310,985	339,499	109.17	448,331	460,167	102.64	134,182	140,880	104.99	212,007
	SILPA Tahun Berjalan	-	500,689		-	357,858		-	206,774		-

*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

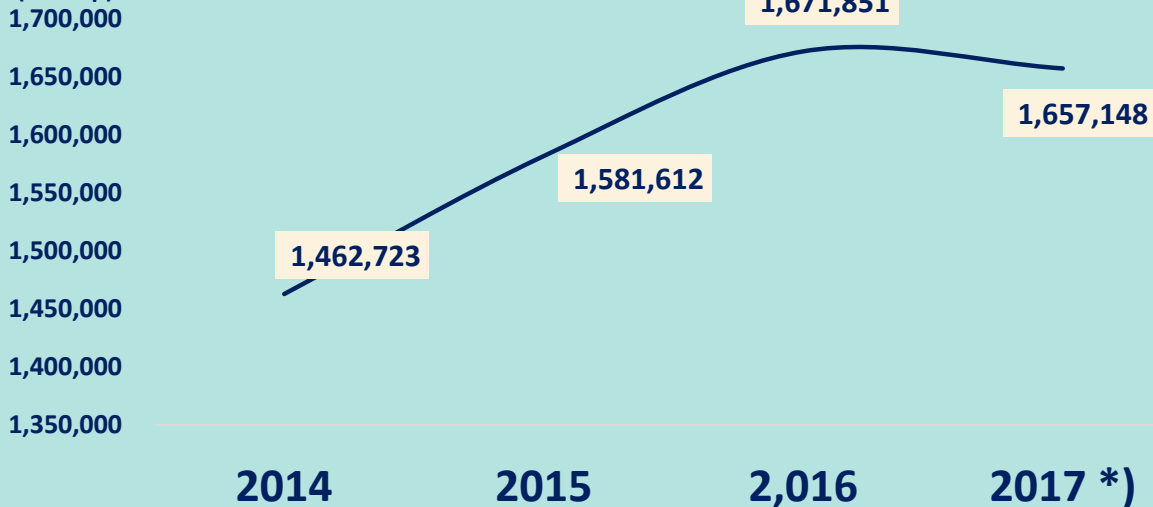


**Pembiayaan Pembangunan
DIY**

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah DIY

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah DIY

(Juta Rp)

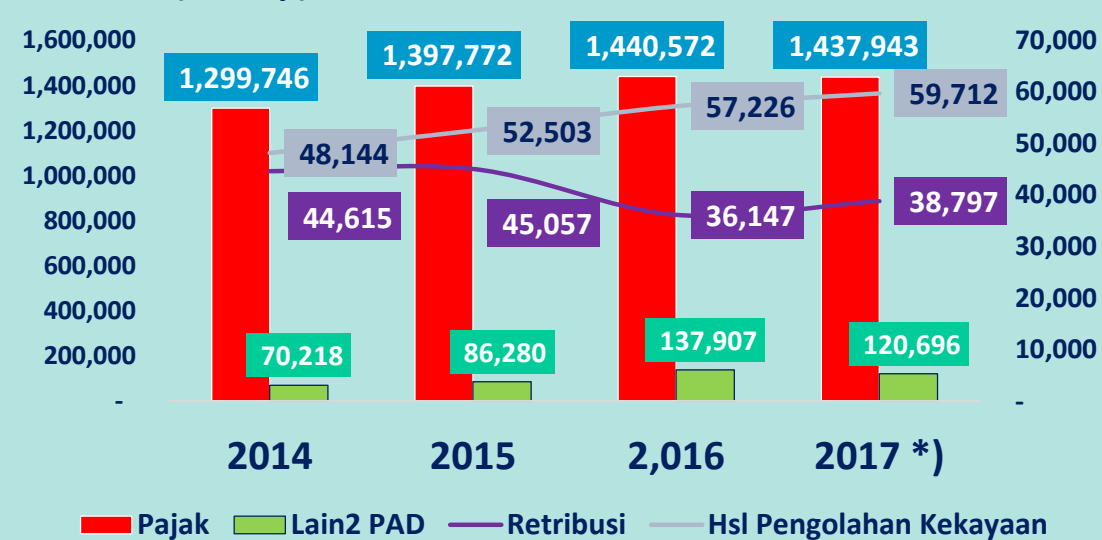


*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

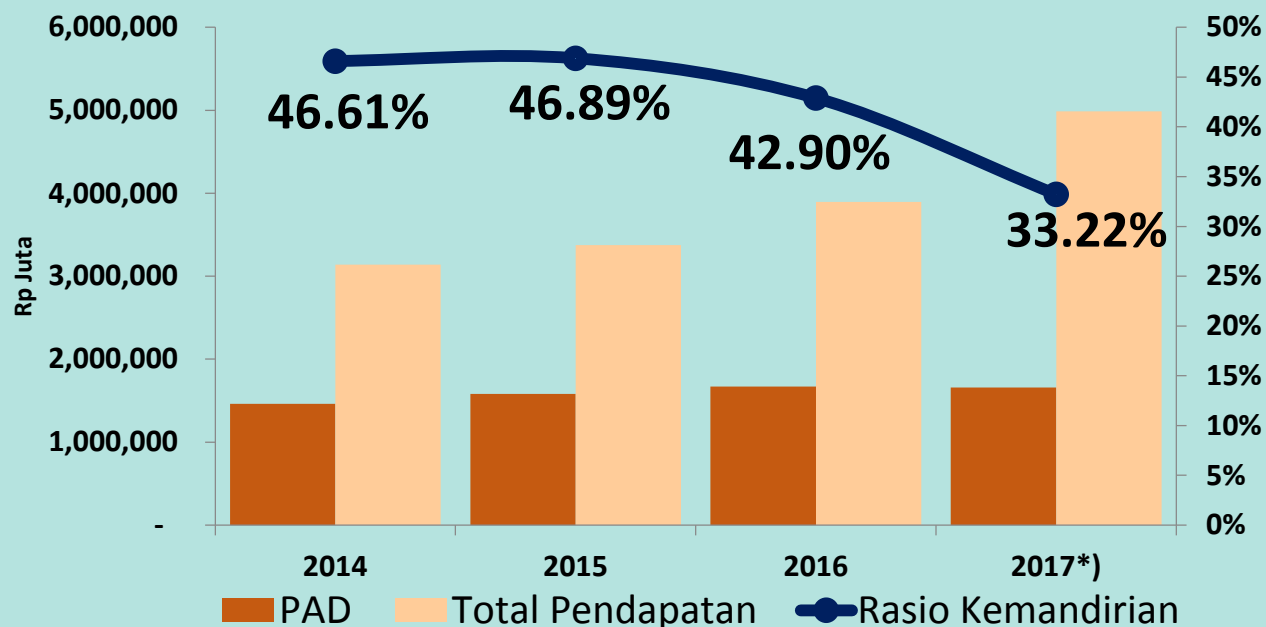
Sumber PAD Pemerintah DIY

(Juta Rp)

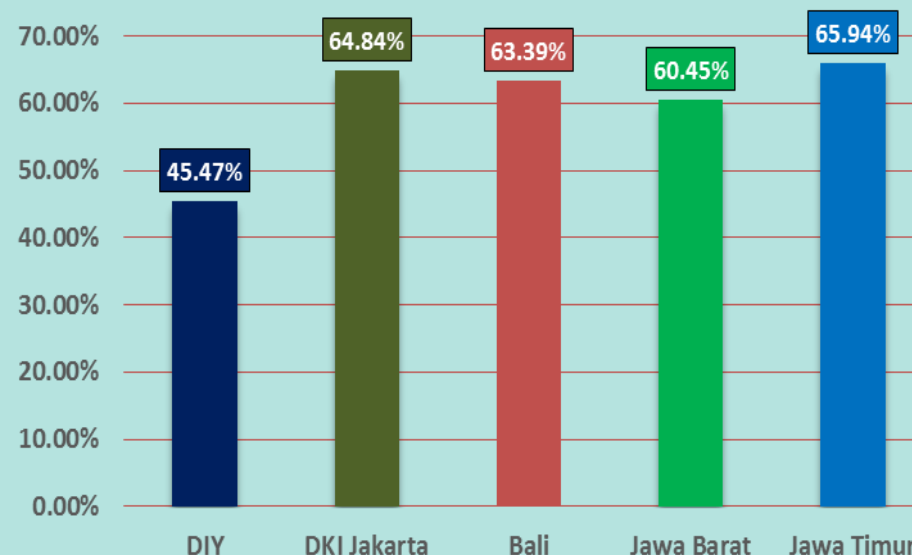


- Secara nominal, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY tahun 2014-2016 selalu meningkat (berkontribusi sebesar 43% dari Total Pendapatan).
- Namun, pada 2017, diperkirakan akan menurun. Penyumbang utama PAD adalah pajak dengan rata-rata kontribusi 3 tahun terakhir 88,32%.
- Sementara Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan masing-masing berkontribusi 2,72% dan 3,51%.

Kemandirian Keuangan Pemerintah DIY



Rata-Rata Rasio Kemandirian Beberapa Provinsi



*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

- Tingkat kemandirian keuangan Pemerintah DIY menunjukkan tren yang menurun. Dan lebih rendah dari beberapa provinsi di Jawa.
- Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah semakin kecil.
- Untuk itu, perlu dicari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru atau intensifikasi & ekstensifikasi sumber2 yang sudah ada, sehingga finansial pemerintah DIY lebih mandiri untuk membiayai pengeluaran.

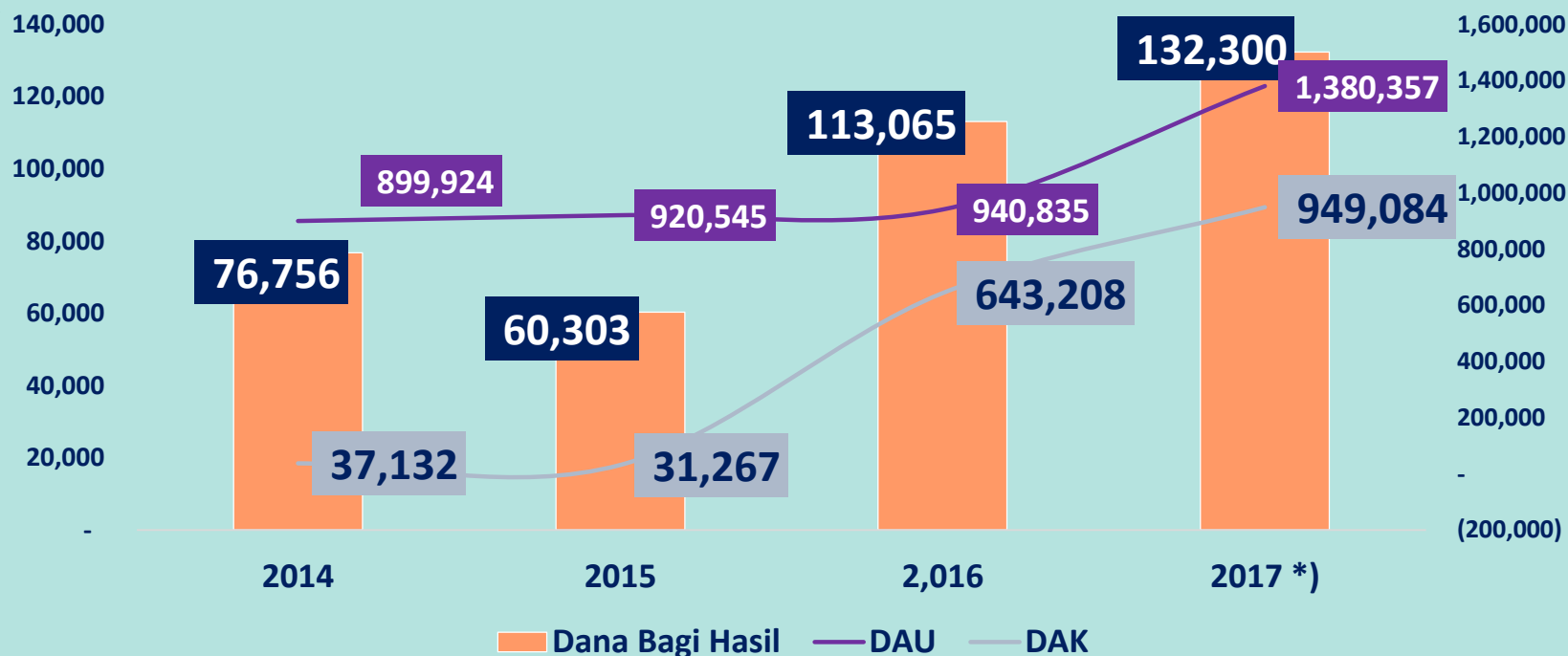


Perkembangan Dana Perimbangan Pemerintah DIY



Dana Perimbangan DIY berkontribusi 36,3% (rata-rata 2014-2016) dari Pendapatan. Komponen terbesar dari Dana Perimbangan berasal dari DAU yang mencapai 75,8% dari Dana perimbangan. Sementara itu, porsi Dana Bagi Hasil hanya mencapai 8,9%

Sumber Dana Perimbangan Pemerintah DIY
(Juta Rp)



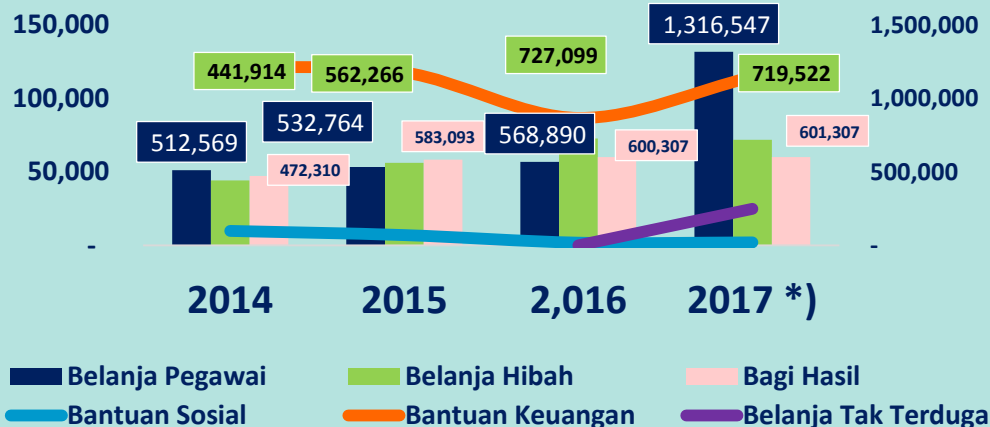
*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

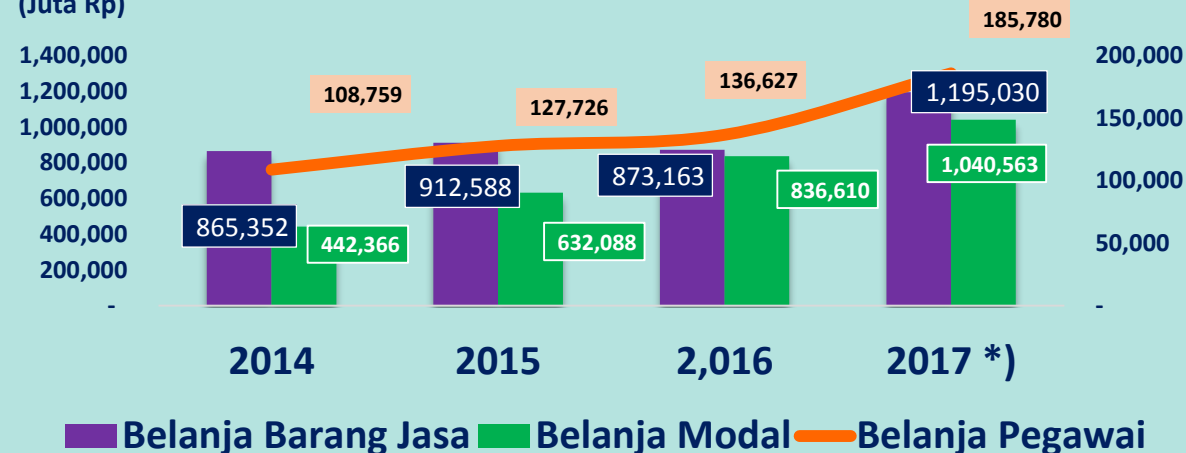


Penggunaan Belanja Tidak Langsung & Langsung Pemerintah DIY

Penggunaan Belanja Tidak Langsung
(Juta Rp)



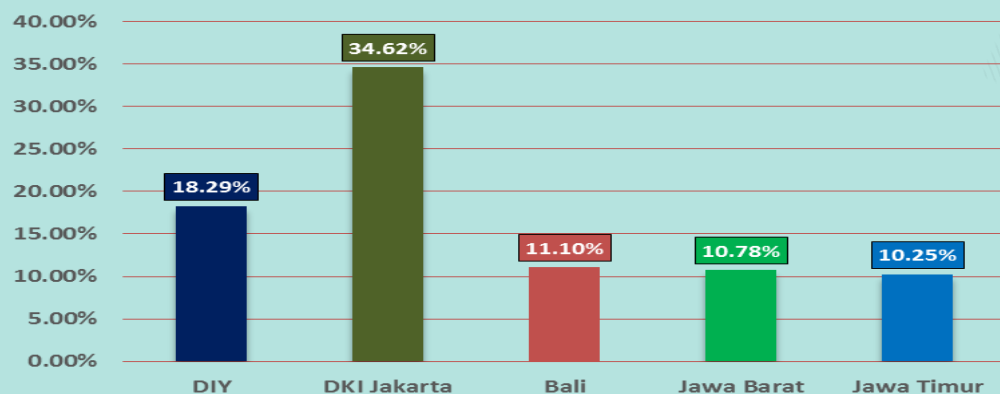
Penggunaan Belanja Langsung
(Juta Rp)



*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

Rata-Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
Beberapa Provinsi

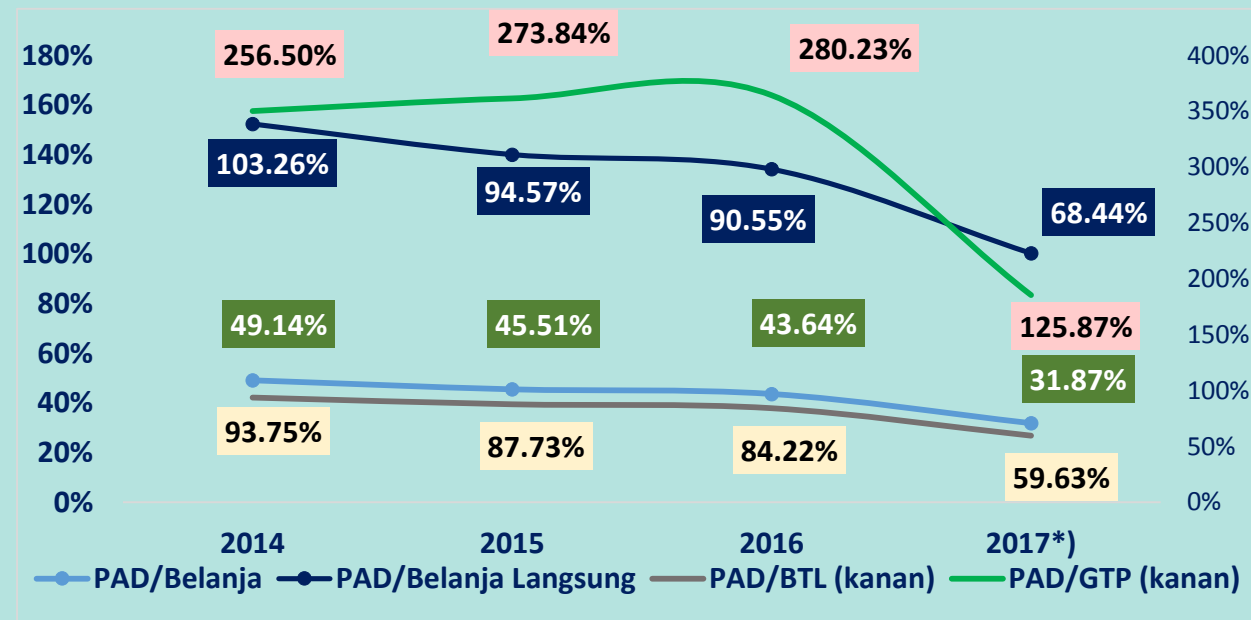


- Porsi Belanja Tidak Langsung dan Langsung, masing-masing adalah 52% dan 48% (rata-rata 2014-2016).
- Porsi Belanja Modal rata-rata 2014-2016 sebesar 18,3% dari Total Belanja.
- Porsi Belanja Modal di DKI dalam kurun waktu yang sama adalah 34,6%.

Kemampuan PAD DIY Membiayai Belanja Daerah



- Kemampuan PAD DIY menopang kebutuhan belanja pengeluaran pemerintah menunjukkan tren yang menurun, termasuk dalam RAPBD DIY tahun 2017.
- Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak dapat mengimbangi peningkatan Belanja.
- Perlu diwaspadai karena hal ini menunjukkan melemahnya kemampuan untuk mendorong pertumbuhan seiring dengan penurunan kemampuan investasi pemerintah DIY .



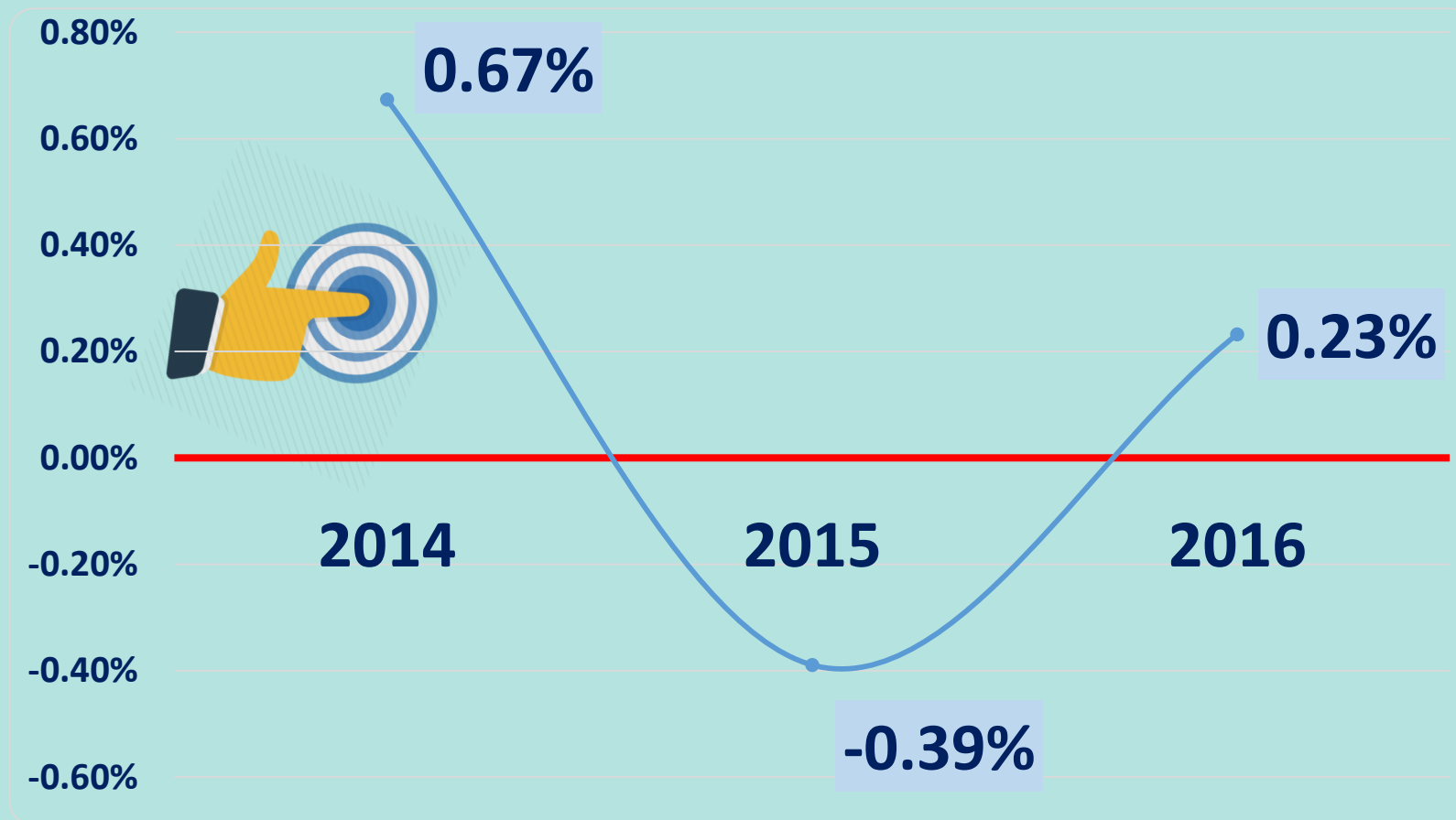
*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)



Rasio Surplus/defisit APBD Pemerintah DIY

- Untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, Belanja Modal DIY perlu didorong melalui peningkatan Pembiayaan, mengingat defisit Keuangan Pemerintah DIY masih memungkinkan dan jauh di bawah threshold 2,5–3,0% PDRB.
- Belanja tersebut terutama digunakan untuk investasi produktif yang dapat memberikan imbal balik terhadap peningkatan pendapatan daerah, seperti rumah sakit, pengelolaan lahan/gedung dan pembiayaan sektoral.



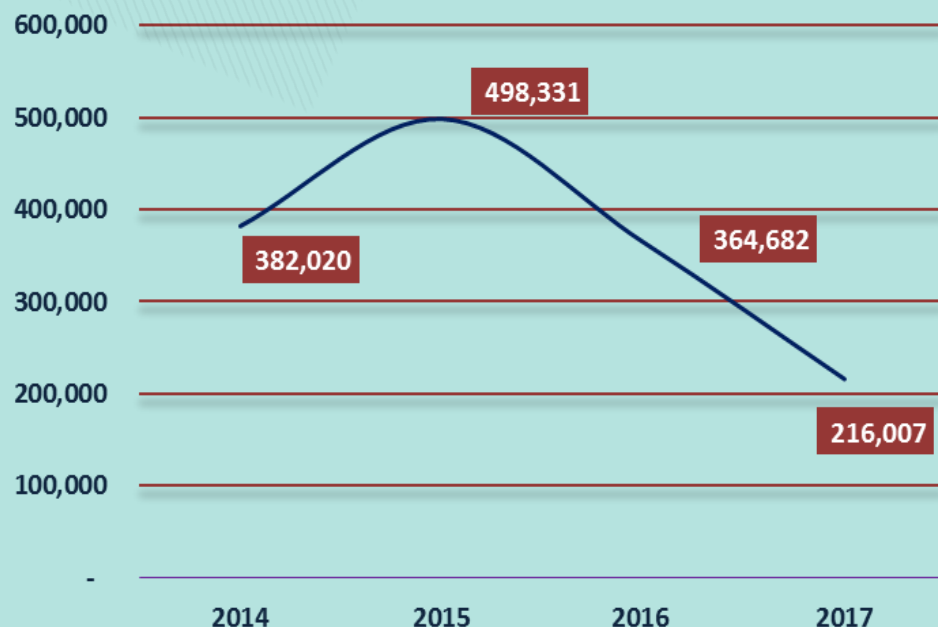
Sumber: DPPKA DIY (diolah)

*) Rencana anggaran PAD Pemerintah DIY 2017

Sumber Pembiayaan Defisit APBD Pemerintah DIY



Selama ini, sumber pembiayaan DIY berasal dari SILPA yang jumlahnya terus menurun. Oleh karena itu, perlu menggali sumber-sumber pembiayaan lain yang belum dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan belanja Pemerintah DIY



(Juta Rp)

No	Pembiayaan	2014	2015	2016	2017 *)
1	SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	382,020	498,331	364,682	216,007
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
7	Penerimaan Kembali Investasi dana Bergulir	7,479	11,836	6,197	-
8	Penerimaan dari Biaya Penyusutan Kendaraan	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan		389,499	510,167	370,880	216,007

*) Rencana Pembiayaan APBD Pemerintah DIY 2017

Sumber: DPPKA DIY (diolah)

Menopang Growth 5,0- 5,4%

**Dibutuhkan pertumbuhan
Belanja pemerintah harus**

6,2%

Pertumbuhan

2015 5,5%

2016 2,11%



**Peningkatan
Belanja**



1. Penggunaan SILPA yang optimum
2. Penggunaan Dana Cadangan
3. Pinjaman Perbankan
4. Penerbitan Obligasi Daerah untuk Proyek yang mendorong pertumbuhan 2018-2019
5. Pemberdayaan BUMD
6. Kerjasama dengan BUMN
7. Kerjasama dengan Pemda (khususnya Pemda berAPBD Surplus)
8. Mendorong Program Private Public Partnership (PPP)
9. Membentuk RIRU (Regional Investor Relation Unit)



**Pembiayaan
Pembangunan
DIY**

Tantangan APBD Pemerintah DIY

1

Perlu menggali Sumber-Sumber PAD Baru, selain pajak kendaraan.

2

Perlu Mencari Sumber-Sumber Pembiayaan, antara lain melalui obligasi pemerintah dan BUMD yang profesional dan *profitable*.

3

Meningkatkan Belanja Modal yang mampu *men-generate Income*, a.l. penyertaan modal untuk pendirian rumah sakit int'l, pengembangan obyek pariwisata, dan penunjuang aktivitas pembangunan bandara Kulon Progo.

4

APBN Kementerian di daerah seluruhnya disalurkan melalui APBD. Selain untuk memudahkan koordinasi, juga akan menjaga fokus/prioritas SKPD.

5

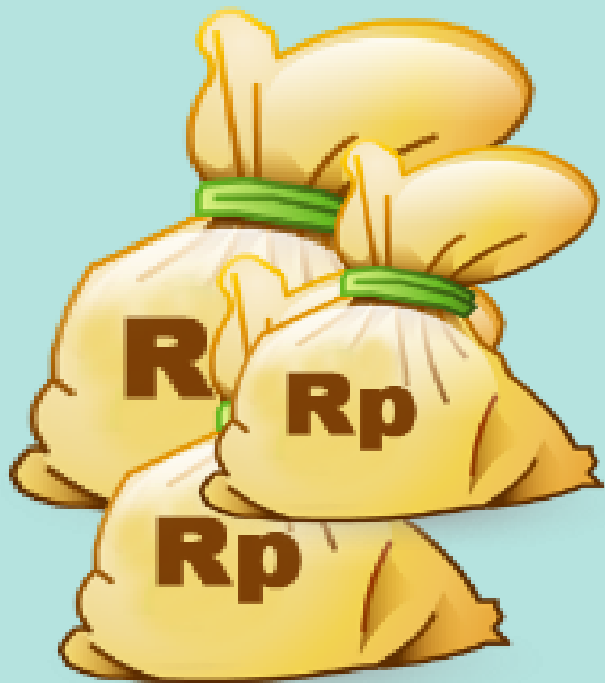
Melakukan *alignment*/penyelarasan atas program kerja yang diajukan SKPD dengan melakukan alokasi belanja yang efektif dan *measurable*.

6

Program pusat di daerah harus sepengetahuan & persetujuan daerah

7

Kesamaan pandangan dan *political will* antara eksekutif dan legislatif dalam menentukan prioritas pembangunan dan rencana tindak untuk mewujudkannya.



Arah Kebijakan Pembangunan DIY



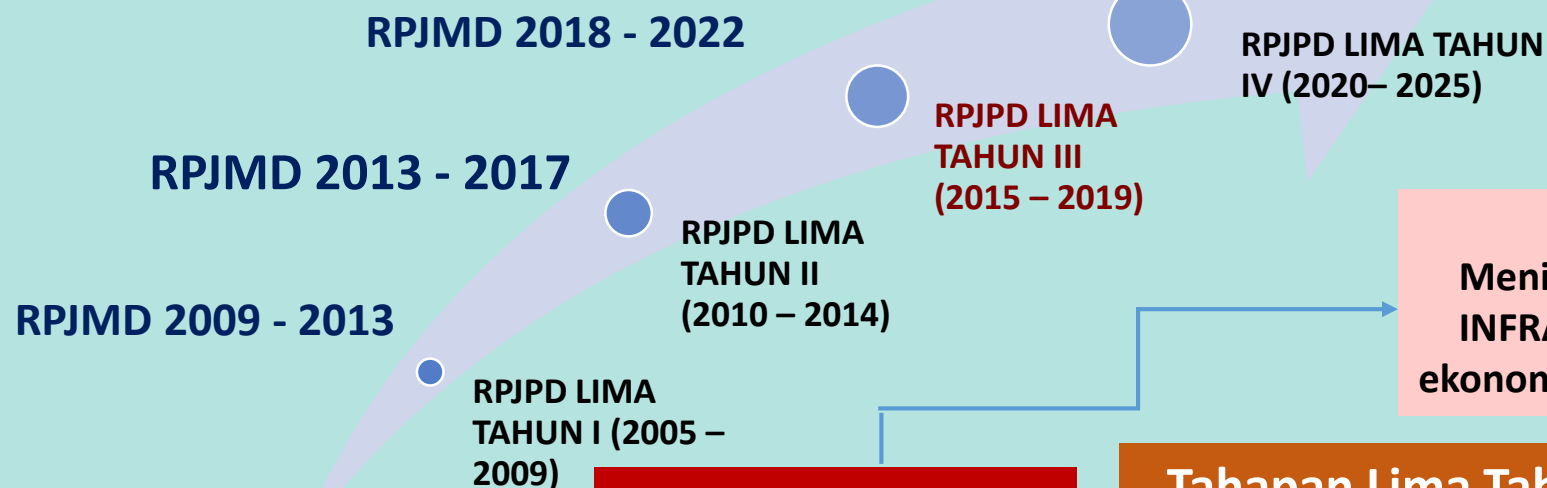
Arah Kebijakan Pembangunan DIY

Arah pembangunan DIY ditujukan untuk mencapai Visi DIY 2015 (RPJP), yang saat ini berada dalam Tahapan Lima Tahun Ke-3 (2015 – 2019) RPJPD

VISI RPJP DIY 2025

DIY sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju dan Sejahtera

Sumber: Bappeda DIY



RKPD DIY 2018

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan INFRASTRUKTUR, untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang berkeadilan

RKP 2018 Nasional

Memacu investasi dan memantapkan pembangunan INFRASTRUKTUR untuk percepatan ekonomi yang berkualitas

Tahapan Lima Tahun III (2015 – 2019)

“Pendayagunaan kapasitas keunggulan daerah melalui penguatan SDM dan fasilitas pendukung, akselerasi usaha ekonomi dan industri unggulan, serta penguatan jejaring”

Tahapan Lima Tahun IV (2020 – 2025)

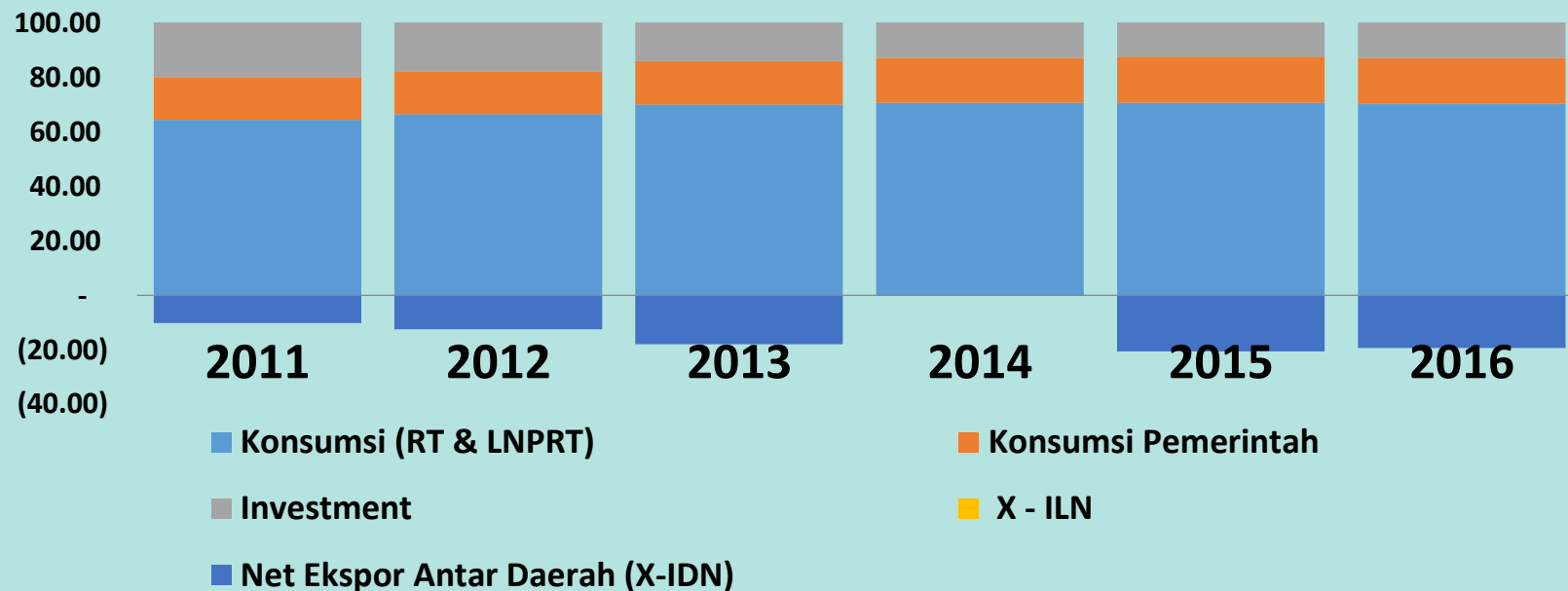
“Penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetensi SDM serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah”



Struktur Pertumbuhan DIY dan ICOR

Pembangunan ekonomi DIY belum secara optimal mencerminkan pertumbuhan yang sustainable dan inklusif, karena ditopang oleh Konsumsi Masyarakat dan Konsumsi Pemerintah yang mencapai 80%.

Sumber: BPS DIY – diolah



Infrastruktur sebagai Akselerator Pertumbuhan DIY

Sesuai dengan tema RKPD 2018, DIY perlu menggenjot dan mempercepat pembangunan 6 infrastruktur prioritas yang terpusat pada pembangunan Bandara Baru dan Airport City Kulon Progo untuk mendukung pertumbuhan ekonomi disektor-sektor unggulan DIY.

1 JJLS & Jaringan kereta api

dari Prambanan-Tugu ke bandara. Proyek mencakup reaktivasi stasiun kereta, terutama stasiun KA Yogyakarta-Borobudur. Jalur lalu lintas selatan termasuk jembatan kretek 2 dan jembatan kelok dua belas.

2 Sarana Publik Airport City

pembangunan rumah sakit internasional, rekreasi, pusat pembelanjaan dan olah raga.

3 Transit antarmoda transportasi

6 Infrastruktur PRIORITAS PEMDA DIY

6 SPAM

Sistem penyediaan air minum di empat kabupaten.

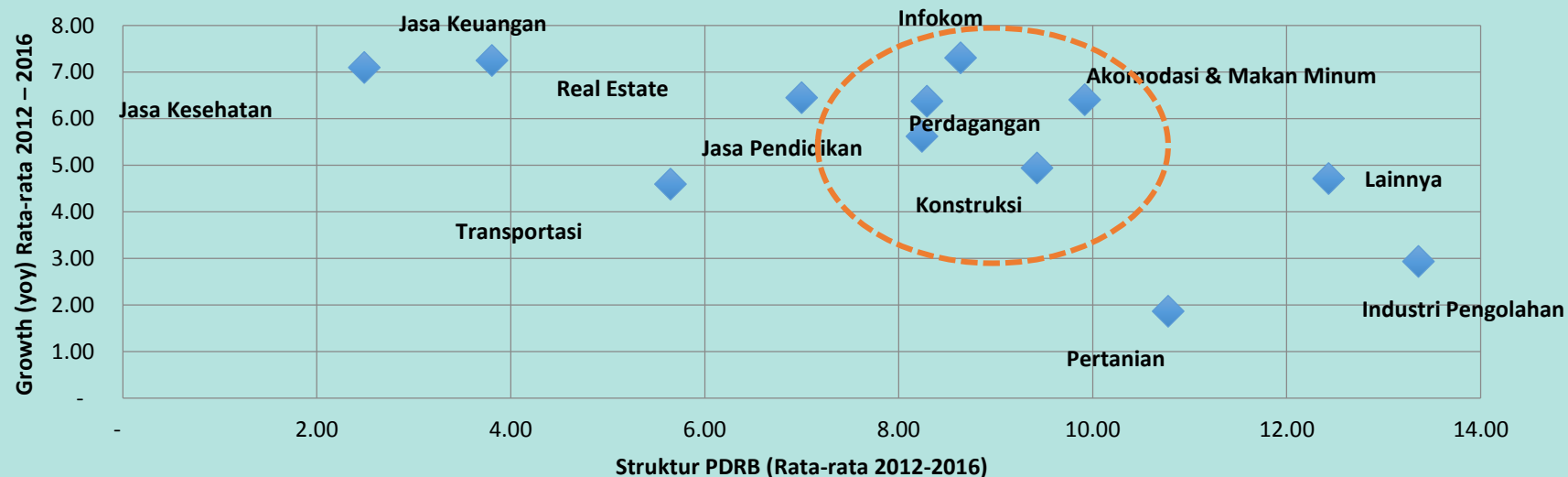
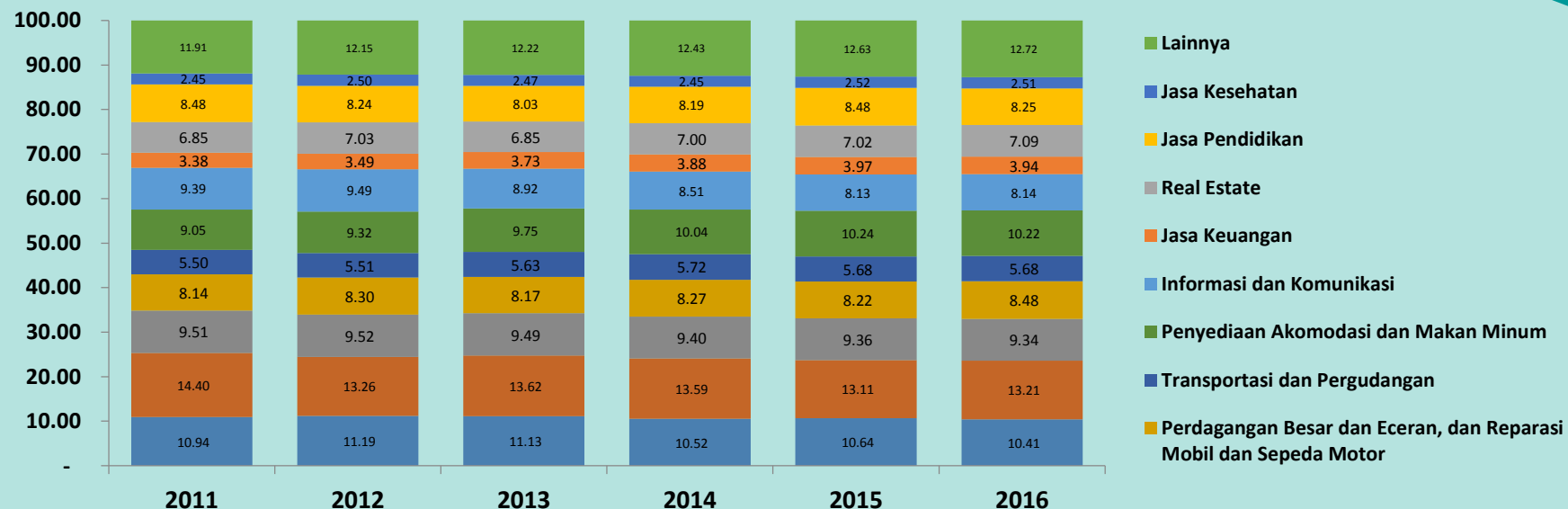
5 Jaringan Listrik

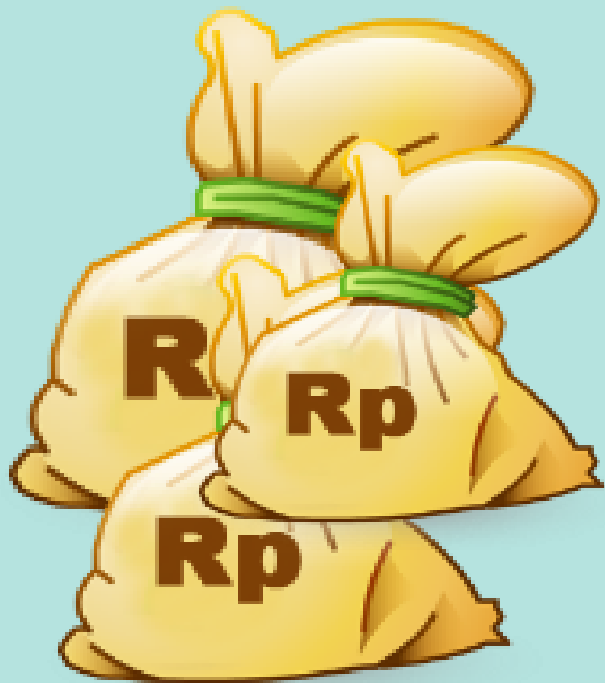
Infrastruktur penyediaan gardu listrik dengan rencana penambahan gardu listrik berkapasitas 150-200 KiloVolt.

4 Jogja Outer Ringroad (JORR) & Tol Bawean- Jogja-Solo

Prioritas pengembangan infrastruktur DIY diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan DIY (Konektivitas, Pariwisata, Airport City dan Pendidikan).

Sumber: BPS - diolah DIY





Potensi Sumber Pembiayaan Pembangunan



Sumber Pembiayaan:

1. Perbankan

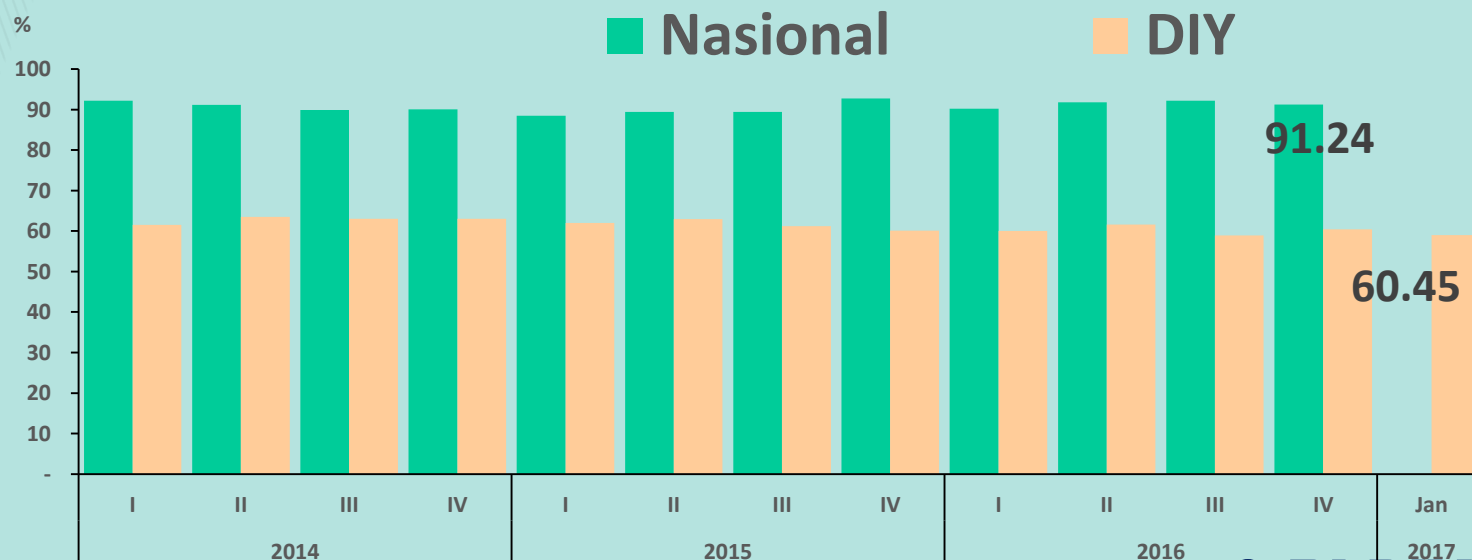
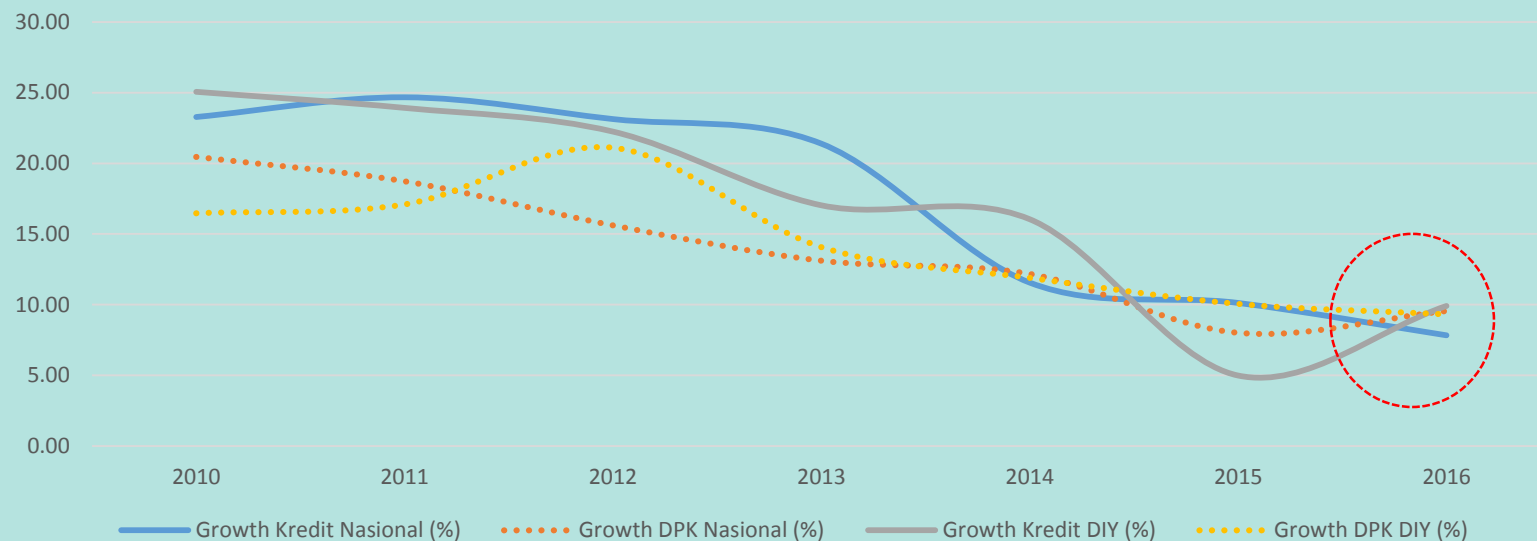
Baik Nasional maupun DIY, pertumbuhan DPK meningkat di 2016.

Namun pertumbuhan kredit nasional masih melambat, sedang DIY sudah kembali meningkat

LDR DIY masih dibawah 70%
(di bawah Nasional yang mencapai 90%)

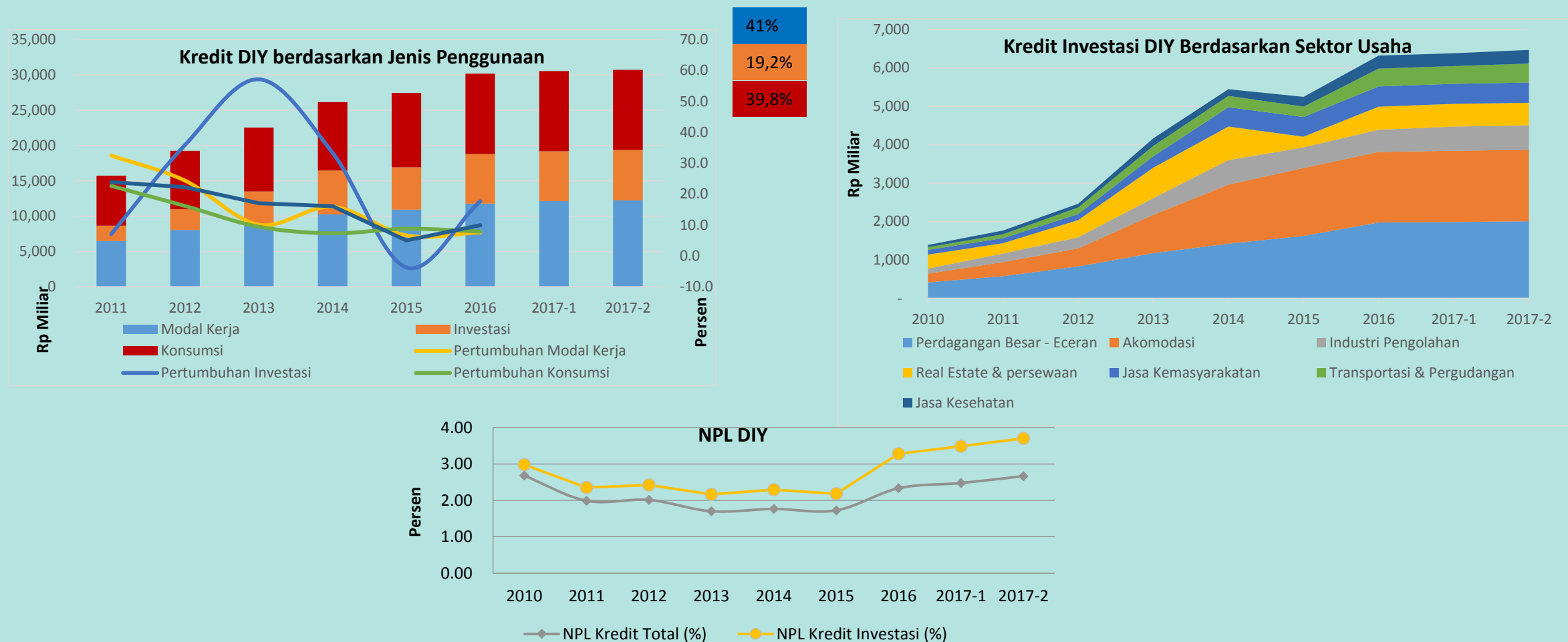


Ruang Peningkatan
Penyaluran
Pembiayaan Perbankan



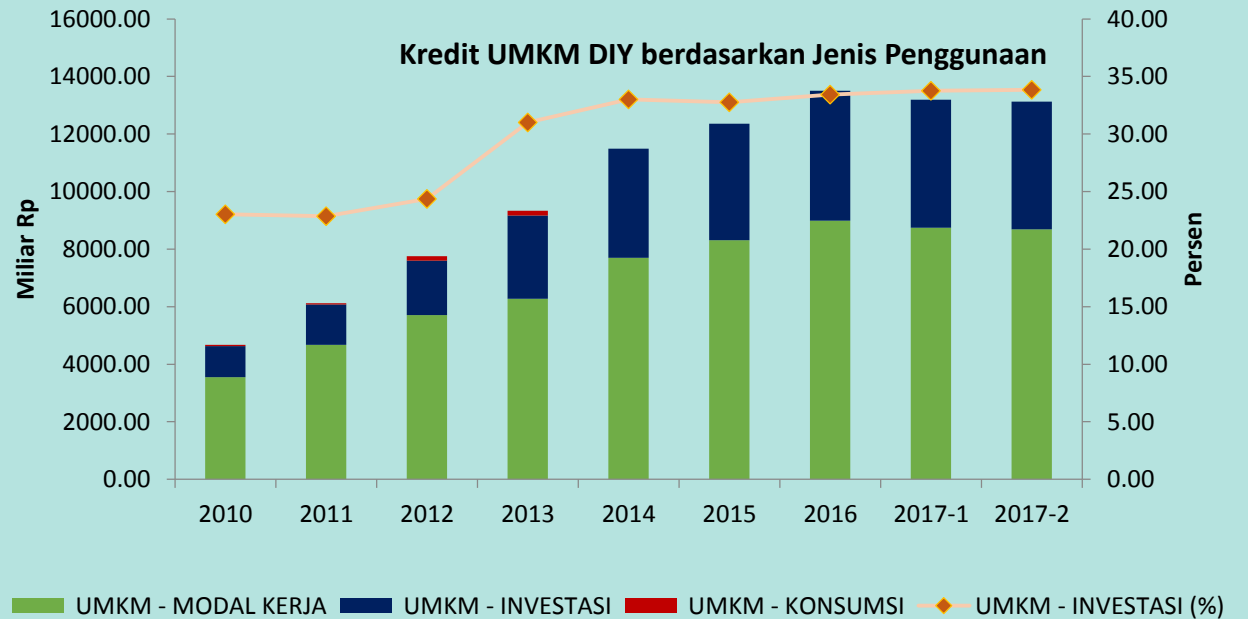
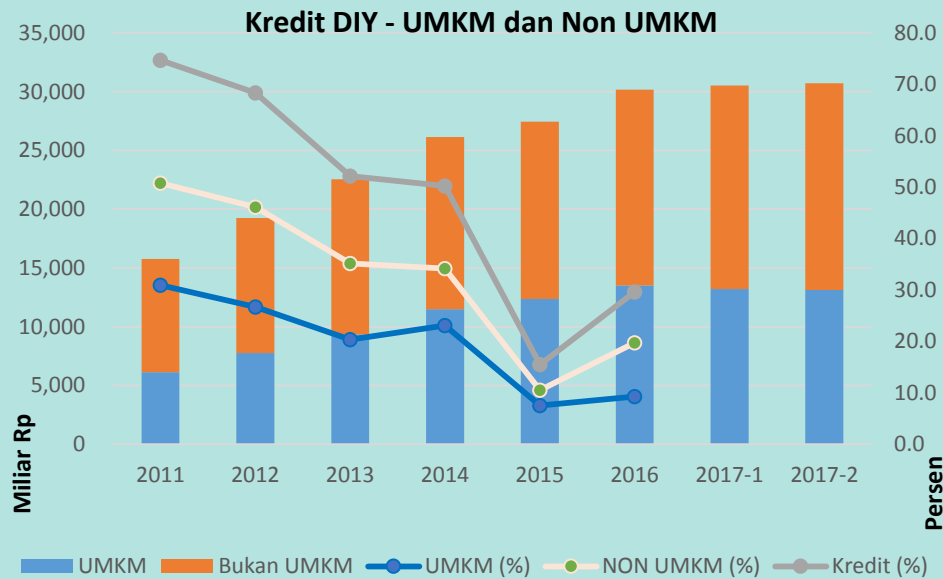
1. Sumber Pembiayaan Perbankan...lanjutan

Kredit perbankan DIY untuk **investasi** relatif kecil, 19,2 % (Rata2 2010-16). Lima sektor terbesar memperoleh kredit sejalan dengan sektor utama PDRB yaitu: Perdagangan Besar-Eceran, Industri Pengolahan, Akomodasi, Real Estat dan Jasa Keuangan. Kolektibilitas Kredit DIY relatif baik dengan tingkat NPL kurang dari 5%.



1. Sumber Pembiayaan Perbankan...lanjutan

Kredit perbankan DIY, sebesar 42% disalurkan kepada UMKM. Sejalan dengan penyaluran kredit perbankan, kredit kepada UMKM kembali meningkat pada 2016, yang sebagian besar untuk modal kerja (66%) dan investasi (34%).



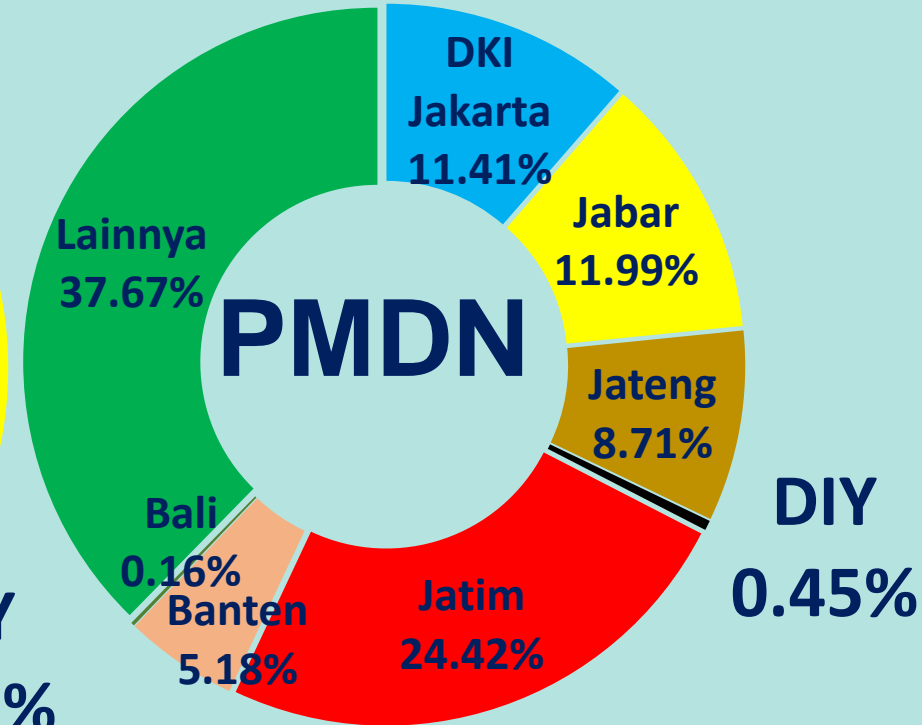
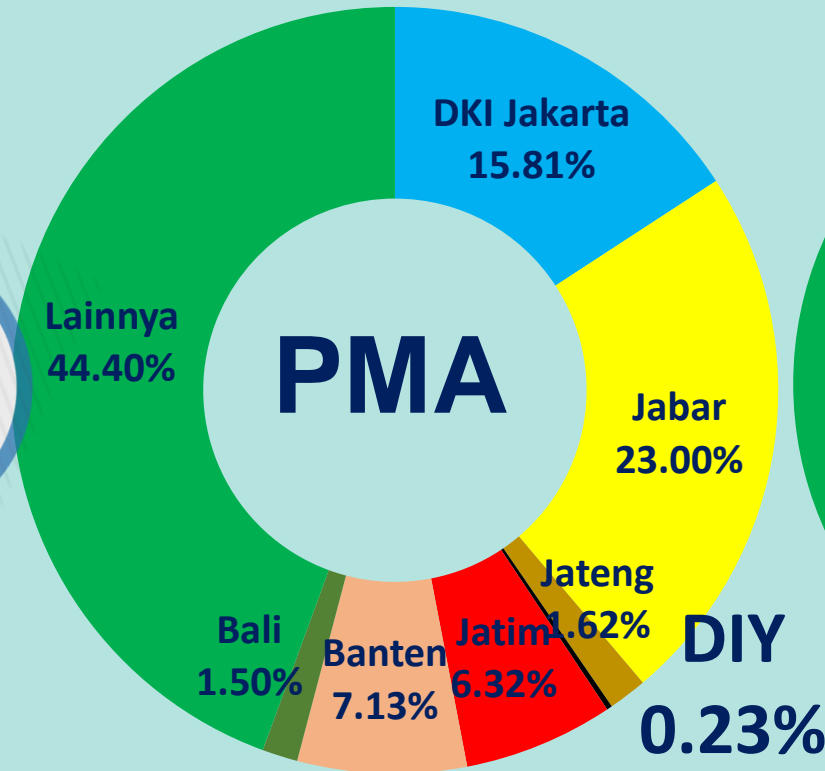
Sumber Pembiayaan:

2.PMA dan PMDN

PMA dan PMDN di DIY masih lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali



**Ruang Peningkatan
Mendorong Investasi
Swasta**



Sumber: BKPM (diolah)

Sumber Pembiayaan:

3. Penerbitan Obligasi Daerah

Dasar Hukum

PMK Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tatacara Penerbitan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah;

Prinsip

- Obligasi Daerah merupakan efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan tidak dijamin oleh Pemerintah;
- Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat (*Revenue Bond*);

Keunggulan Obligasi Daerah

- Cost borrowing lebih murah
- Mendorong pemda meningkatkan *strata good governance*
- Mampu mendorong percepatan pembangunan infrastruktur
- Adanya kendali terhadap pola *expenditure* di Pemda melalui perjanjian pinjaman.



Hal yang Perlu Diperhatikan

- 1 Rasio kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) minimal 2,5 (sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan)
- 2 Manajemen pengelolaan keuangan dan aset pemda harus dikelola secara optimal
- 3 Pemda perlu mendirikan lembaga yang nantinya fokus dalam pengelolaan obligasi
- 4 Pemda harus bersifat transparan, mempunyai manajemen risiko yang terukur, dan stabilisasi politik yang terjaga
- 5 Pemda perlu menyusun dokumen rencana pengembangan obligasi jangka panjang untuk meminimalkan potensi-potensi konflik

Sumber Pembiayaan:

4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

- *Sumbangan BUMD saat ini masih terbatas, BUMD perlu terus ditingkatkan profesionalisme dan efisiensi untuk dapat meningkatkan pendapatan.*
- *Pendirian BUMD baru untuk menggali potensi sumber PAD, seperti rumah sakit internasional, obyek wisata dll*
- *Kerjasama antar BUMD untuk mengatasi permasalahan ekonomi, seperti inflasi dan konektivitas.*



Fungsi BUMD

- 1 Melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi & pembangunan daerah
- 2 Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah
- 3 Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik,
- 4 Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik.
- 5 Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.

Dasar Hukum BUMD: UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yang diperkuat UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

DIY Memiliki 4 BUMD

1. **BPD DIY** (Perbankan)
2. **PT Anindya Mitra Internasional** (Air minum, Transportasi, Percetakan, Perdagangan dan Pertambangan, Jasa Persewaan)
3. **Badan Usaha Kredit Pedesaan** (Pembiayaan UMKM Pedesaan)
4. **PT Tarumatarni** (Cerutu – Ekspor)



**Pembiayaan
Pembangunan DIY**

Sumber Pembiayaan:

5. *Public-Private Partnership*

PPP merupakan alternatif bentuk pembiayaan pembangunan bagi pemerintah daerah dengan menggandeng BUMN atau sektor swasta lainnya. Pola ini, dapat digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur dan sarana publik dalam pengembangan airport city Kulon Progo.

PPP merupakan bentuk kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta dalam jangka panjang, dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat, kedua belah pihak menerima kompensasi secara langsung maupun tidak langsung, dan pihak swasta bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan pada saat pelaksanaan kerjasama.

Dasar Hukum: Perpres Nomor 38 tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

Lingkungan yang Kondusif untuk PPP:

- Kerangka kebijakan yang jelas
- Peraturan & Prosedur jelas, dan terinci
- Budaya kompetisi yang sehat
- Transparansi dalam setiap transaksi
- Pejabat pemerintah yang professional



Manfaat PPP:

- Memperoleh dana investasi tambahan.
- Meningkatkan pendapatan pemerintah.
- Mengadakan jasa umum yang belum tersedia.
- Mengoptimalkan penggunaan *asset idle*.
- Memperoleh teknologi baru yang unggul.
- Memperbaiki tingkat efisiensi proyek.
- Menciptakan kesempatan kerja.
- Meningkatkan kompetisi dan transparansi pengadaan.

Proyek-Proyek PPP (Contoh)



Jalan Toll



Revitalisasi Stasiun Tugu dengan PT KAI



Rumah Sakit Internasional



Bandara Kulon Progo – PT AP



Taman Hiburan



Pembangkit Tenaga Listrik

Sumber Pembiayaan:

6. *Corporate Social Responsibility*



Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL)
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan
- Undang-Undang Penanaman Modal No.25 Tahun 2007
- Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi No.22 Tahun 2001

Pola CSR



Program Penataan Sarana Pedagang Candi Prambanan



Program Tanam Mangrove di Muara Kali Opak Yogyakarta



Program CSR Rumah Srikandi PT Sari Husada



Program CSR BPD DIY



Peran Bank Indonesia dalam Memperkuat Sumber Pembiayaan Pembangunan



Peran BI



Menciptakan Iklim Berusaha yang Sehat

- Menjaga inflasi tetap rendah dan stabil.
- Menjaga volatilitas nilai tukar
- Menjaga likuiditas dan peredaran rupiah
- Menjaga sistem pembayaran lancar, aman, efisien



Mendorong Penyaluran Kredit Perbankan

Untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ke sektor produktif, kreatif, dan padat karya



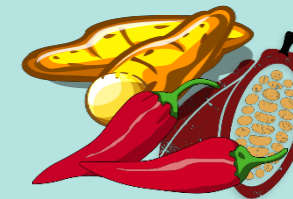
Membentuk RIRU

- Mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kerjasama dinas/ instansi/ lembaga terkait
- Mengembangkan website (Regional Investor Relation Unit) sebagai media penyediaan data dan informasi bagi calon investor



Program Sosial Bank Indonesia

Peningkatan alokasi dana melalui program sosial Bank Indonesia untuk sektor industri kreatif



Pengembangan Kluster

Pengembangan kluster yang mendukung ketahanan pangan dan pengembangan UMKM di daerah



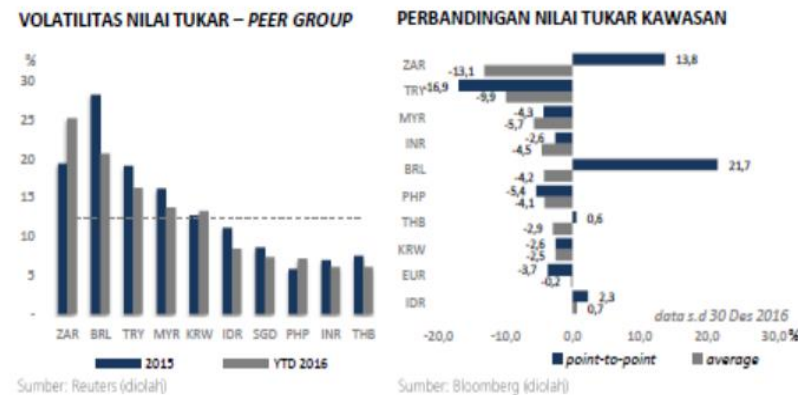
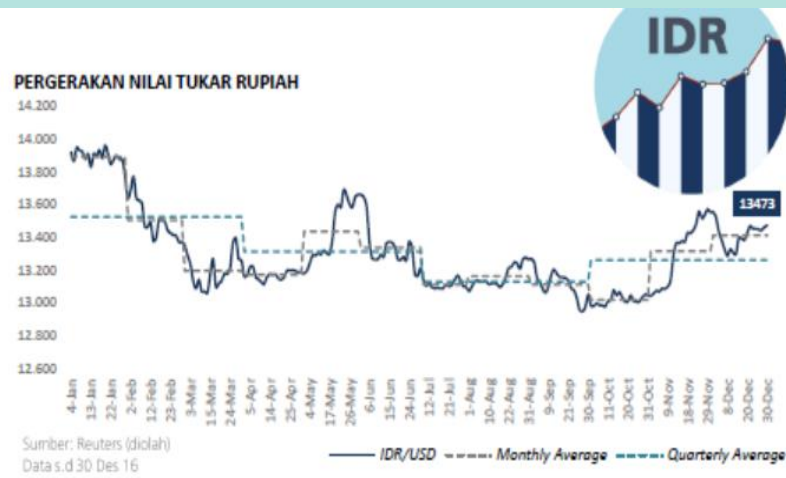
Mendorong Start Up Fintech

Mendorong perkembangan fintech sekaligus sebagai regulator



Pembiayaan Pembangunan DIY

Stabilitas Makroekonomi



**Nilai Tukar
Menguat di Level**

13.473

**Per Desember
2016**

**Volatilitas
Nilai Tukar
TURUN**

**2016
dibandingkan
2015**

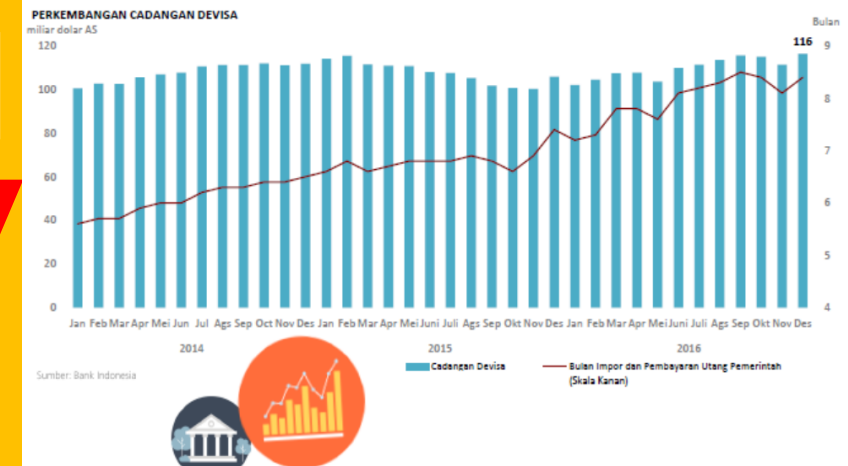
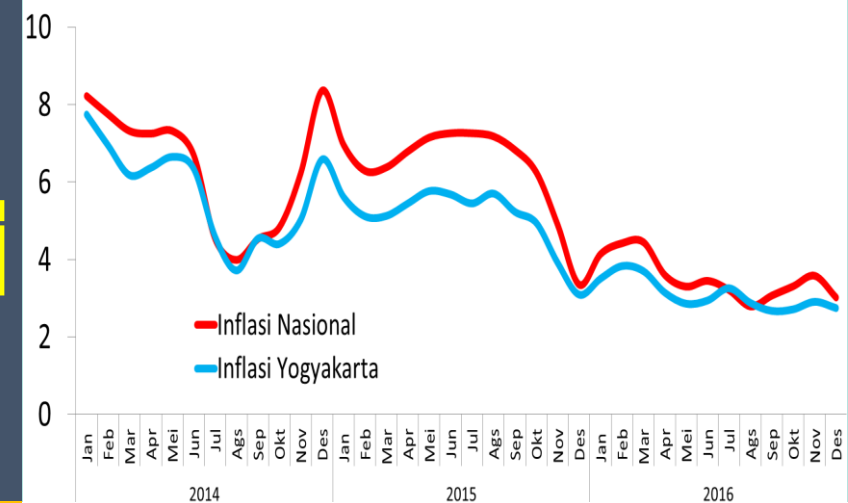
3.02
Nasional

inflasi

2.29
DIY

116M
CaDev

8.8
Bulan Impor

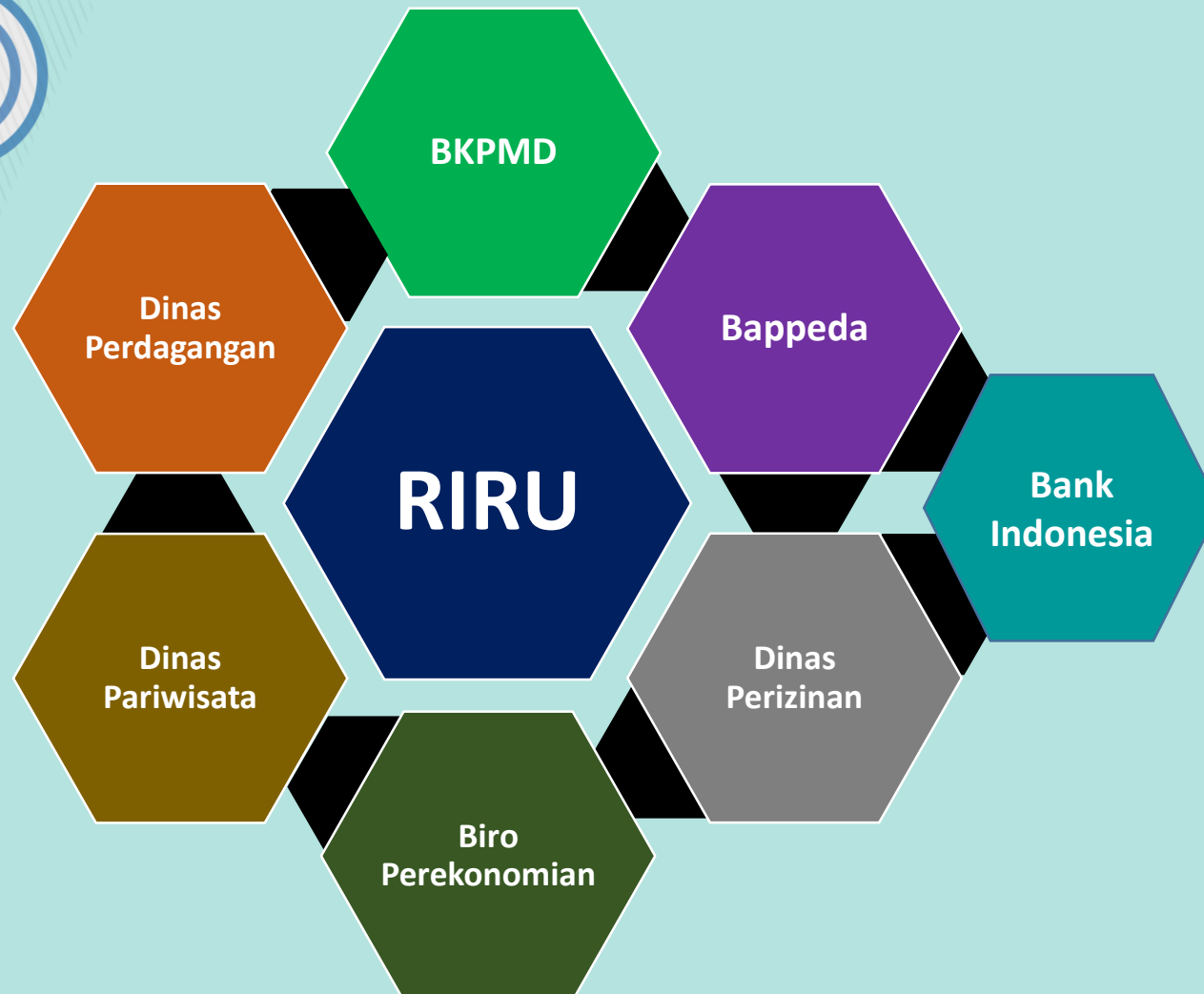


Membentuk RIRU



Tujuan :

Mendorong percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi DIY yang berkesinambungan dan inklusif melalui kerjasama dinas/instansi/lembaga terkait, dengan melakukan promosi potensi investasi dan pariwisata. Promosi tersebut dilakukan melalui pengembangan website (*Regional Investor Relation Unit*) sebagai media bagi calon investor untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan oleh calon investor untuk melakukan investasi.



Program Sosial Bank Indonesia PSBI

Tenun



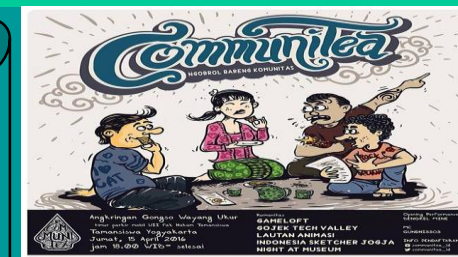
- ★ **Desa Wisata Tenun di Gampong Sleman**
- ★ **Fasilitasi pembangunan Joglo sebagai showroom dan sarana pemasaran tenun gampong**

Batik



- ★ **Batik Gebleg Renteng khas Kulonprogo**
- ★ **Pengembangan usaha dengan pemberian kain mori untuk diolah menjadi batik**
- ★ **Pembangunan sarana pengolahan limbah**

Communita



- ★ **Pengembangan Coomunita di kawasan wisata Kotagede**
- ★ **Menggabungkan potensi SDM dengan mengumpulkan pelaku industri kreatif/komunitas kreatif untuk pengembangan pariwisata kreatif**
- ★ **Fasilitasi pendanaan kegiatan communita**

Gula Semut

Komoditas Unggulan UMKM Kulon Progo

Lahan **17.159** ha
5.933 KK penderes
13.104 tenaga kerja

HAKI Masyarakat Perlindungan
Indikasi Geografis Gula Kelapa
Kulon Progo (MPIG-GKKP)



Pengembangan UMKM (Klaster)

Cabai

41

Asosiasi Pasar Tani Karya Manunggal, 3300 petani, tersebar di 4 kecamatan, luas lahan 1400 ha.

Bantuan teknis, bantuan sarana prasarana fisik dan linkage keuangan.

Hasil: Efisiensi dan produktivitas, stabilitas harga dan pasokan, minat bertani meningkat, kesejahteraan petani meningkat, juara II *Championship* Nasional bidang hortikultura.

Pengembangan klaster mocaf Gunungkidul didasarkan komoditas unggulan daerah dan pengembangan UMKM.

Hasil: Produk sesuai standar SNI, Terbentuknya paguyuban mokaf, tataniaga mokaf, peningkatan diversifikasi produk, posisi tawar dan daya saing produk.



Gapoktan Kumpul Makaryo terdiri 5 Koptan dan 1 KWT dengan total anggota 645 orang dan luas lahan kakao 40,5 ha.



Sinergi bersama Dinas Perkebunan dan Kehutanan Gunungkidul dan BPTBA LIPI DIY



Kakao

Mocaf



Pembiayaan
Pembangunan
DIY

Fintech dan Ekonomi Digital

42

Inovasi Teknologi mengubah pola hubungan antara bank dan nasabah

Peran *middle man* semakin tereduksi (misalnya, tercermin pada menurunnya fungsi kantor cabang)

Teknologi mendorong layanan keuangan lebih cepat dan efisien

Keunggulan kompetitif bagi pihak yang mampu cepat mengadopsi teknologi

Fleksibilitas sektor keuangan formal dalam berinvestasi dan intermediasi menurun pasca-GFC 2008. Sementara, lembaga non formal cenderung lebih fleksibel

New entrants, yaitu lembaga non formal yg hadir sebagai solusi alternatif atas ketidakefektifan fungsi sektor keuangan formal

Akselerasi Fintech didorong oleh munculnya sejumlah inovasi teknologi

Faktor-faktor yang mendorong ekonomi digital

Internet of things

Virtual currencies

Advance robotic and 3D printing

Sharing economy

Increased access to government data

Reinforced protection of personal data



MATUR NUWUN
